



Universiteit
Leiden
The Netherlands

The road to drain or gain: Dutch private investment and economic development in late colonial and early independent Indonesia

Water, M.P. van de

Citation

Water, M. P. van de. (2023, September 20). *The road to drain or gain: Dutch private investment and economic development in late colonial and early independent Indonesia*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3641503>

Version: Publisher's Version
License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3641503>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Ringkasan

Disertasi ini membahas tentang pengaruh investasi sektor swasta Belanda di Hindia Belanda dan masa awal Indonesia merdeka. Tujuan dari analisis yang dilakukan adalah untuk menambah kontribusi pada wacana saat ini, perihal sejauh mana pengaruh positif–dengan kata lain keuntungan–dari hadirnya keberadaan Belanda di Indonesia yang ditinjau secara ekonomi. Dalam disertasi ini terdapat tiga topik berbeda yang didiskusikan, yaitu: investasi, keuntungan dan keterkaitan.

Sehubungan dengan investasi, saya berfokus pada sejumlah perusahaan, ukuran dan kenegaraan mereka, serta jenis industri yang dioperasikan mereka. Hubungan antara pembangunan ekonomi di Hindia Belanda dan investasi asing langsung (FDI), khususnya investasi Belanda, merupakan inti dari analisis yang saya lakukan. Dalam pembahasan mengenai keuntungan, tujuan saya adalah untuk menentukan apakah tingkat keuntungan dari investasi di Indonesia lebih tinggi daripada tempat lainnya dan apakah hal tersebut dapat dianggap berlebihan, misalnya pengurasan sumber daya dari tanah jajahan. Topik keterkaitan berfungsi untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dari investasi swasta asing mengenai efek langsung dan tidak langsung yang sampai batas tertentu akan mengkompensasi pengurasan tersebut. Penelitian ini mengambil dua periode waktu, yaitu: periode akhir-kolonial Belanda dari 1910 hingga pecahnya Perang Pasifik pada 1942, dan periode waktu dari Perang Pasifik dan seterusnya, termasuk awal kemerdekaan, hingga sekitar 1960, ketika dekolonisasi ekonomi penuh telah tercapai. Penelitian ini memaparkan tiga studi kasus: Billiton, Deli Maatschappij dan HVA. Pertanyaan penelitian utama saya adalah sebagai berikut: Sejauh mana kontribusi investasi swasta Belanda terhadap pembangunan ekonomi Hindia Belanda dan Indonesia antara 1910 dan 1960?

Bab 1 menyajikan pengantar umum. Di sini saya memberikan gambaran tentang metodologi, kerangka teori, pertanyaan penelitian, dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan perdebatan mengenai kebermanfaatan kehadiran Belanda di Indonesia bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pengaruh operasi-operasi perusahaan bisnis asing terhadap perkembangan ekonomi pribumi masih menimbulkan banyak pertanyaan. Setiap pernyataan tentang kontribusi Belanda terhadap ekonomi pribumi pasti menimbulkan kritik dan sanggahan dari kedua sisi perdebatan. Oleh karena itu, terdapat suatu kepentingan bagi para sarjana untuk mengatasi masalah tersebut dan menjelaskan warisan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia.

Pada bab 2 saya menunjukkan bahwa setelah Sistem Tanam Paksa dibongkar pada tahun 1870, pemerintah kolonial membuka kepulauan tersebut untuk investasi swasta asing. Beberapa tahun sejak 1870 sampai sekitar 1900 merupakan periode ekspansi investasi swasta asing di tanah jajahan Indonesia. Secara teoritis, pintu investasi terbuka lebar baik untuk investor swasta Belanda maupun investor asing non-Belanda. Namun, dalam praktiknya, perusahaan Belanda disukai oleh jaringan pengusaha dan pejabat Belanda yang sempit. Untuk mendapatkan pijakan di Hindia Belanda, investor asing non-Belanda sering bekerja sama dengan investor Belanda, misalnya dalam pembentukan Royal Dutch Shell.

Jumlah perusahaan asing yang aktif di Hindia Belanda meningkat pesat hingga 1920. Di beberapa industri, misalnya minyak, perusahaan yang lebih kecil diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar. Sebagian besar perusahaan tetap berukuran kecil, terutama pada industri yang produksinya kurang padat modal seperti di bidang pertanian, manufaktur dan perdagangan.

Investor di Hindia Belanda dapat dibagi menjadi lima kategori. Kategori terbesar terdiri dari investor Belanda di Belanda yang mengelola operasi bisnisnya di tanah jajahan dari jarak jauh. Kategori kedua dapat disebut investor Hindia Belanda. Mereka bisa jadi orang Belanda atau memiliki asal etnis campuran dan merupakan penduduk Indonesia. Investor dari negara ketiga digolongkan dalam kategori ketiga. Kategori keempat terdiri dari investor Cina/Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Kategori kelima dan terakhir terdiri dari penduduk pribumi Indonesia. Orang Indonesia menyumbang lebih dari tiga perempat dari semua kegiatan ekonomi di Indonesia (yang saat itu sebagai tanah jajahan).

Mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada masa akhir colonial didirikan di Belanda atau Hindia Belanda. Sebelum Perang Dunia Kedua, gabungan sahamnya melebihi 70% dari jumlah total perusahaan yang tergabung. Investor Inggris membentuk kelompok terbesar kedua. Sekitar seperempat dari total investasi Belanda masuk ke Hindia Belanda. Ini sesuai dengan hampir setengah dari total investasi asing Belanda pada 1938. Hal ini dapat dikatakan bahwa hingga 1940, hampir f4 miliar diinvestasikan oleh investor swasta Belanda saja, dibandingkan dengan sekitar f1 miliar oleh investor asing lainnya.

Pada bab 3 berfokus pada keuntungan dan pengurusan sumber daya tanah jajahan oleh pemerintah kolonial. Dilakukan penilaian terhadap profitabilitas perusahaan milik Belanda untuk mengetahui apakah laba yang dihasilkan dapat dianggap berlebihan. Berdasarkan tingkat laba dan dividen,

dapat diasumsikan bahwa laba tersebut berlebihan. Namun, ini tidak berlaku untuk seluruh periode 1910–1940.

Selama periode 1910–1930 Hindia Belanda mengalami beberapa ekspansi ekonomi. Situasi penduduk pribumi Indonesia baru tampak sedikit lebih baik pada paruh kedua 1920-an. Akibat depresi ekonomi 1930-an, banyak pegawai pribumi yang bekerja di bidang produksi ekspor diberhentikan. Meskipun hanya sebagian kecil dari semua orang pribumi Indonesia yang bekerja di perusahaan asing dan sebagian besar upah diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal, banyak dari mereka diproduksi untuk pasar ekspor dan dengan demikian terdampak depresi ekonomi.

Saya membuat beberapa kalkulasi pengurusan sumber daya koloni dan menyimpulkan bahwa pengurusan sebesar 12% pada 1920–1930 dan 9,5% dari PDB pada 1931–1939 merupakan perkiraan yang masuk akal. Jika sekitar 10–20% dari PDB adalah hasil utamanya dari aktivitas asing, maka keuntungan memang melebihi kerugian. Apakah pengurusan kolonial harus dianggap berlebihan, hal tersebut sulit dipastikan. Namun, pengurusan sumber daya tanah jajahan mewakili proporsi yang sangat besar dari PDB. Dapatkah pengurusan lebih baik diidentifikasi dengan berfokus pada keuntungan? Antara 1910 dan 1939, dua pertiga dari total keuntungan dibayarkan sebagai dividen, sementara sepertiganya diinvestasikan kembali di Hindia Belanda. Jumlah yang diinvestasikan kembali sebanding dengan lebih dari setengah dari semua investasi langsung asing yang memasuki koloni.

Sebagian besar keuntungan sebenarnya tetap ada di Hindia Belanda. Meskipun tidak sebanding, kita melihat bahwa tingkat pengembalian rata-rata lebih tinggi di Hindia Belanda daripada di Belanda. Namun, hasilnya sebagian besar didasarkan pada sampel kecil perusahaan yang memiliki kinerja di atas rata-rata dibandingkan dengan total semua perusahaan berbadan hukum asing di Hindia Belanda. Tingkat dividen nominal terendah relatif tinggi sampai depresi ekonomi sekitar 1930-an. Hasil dari investasi di Hindia Belanda lebih fluktuatif dan rentan terhadap guncangan eksternal yang membuatnya lebih berisiko. Selama 1930-an, pengembalian lebih rendah, tetapi ketika 1920-an dan 1930-an digabungkan, pengembalian di Hindia Belanda masih melebihi di Belanda.

Selain keuntungan yang mengalir ke luar negeri, penggunaan lahan juga harus diperhitungkan. Lahan dipakai oleh investor asing untuk keperluan produksi. Perkiraan kependudukan lahan di Jawa bervariasi mulai dari 3% sampai 18% dari total lahan irigasi. Oleh karena itu, kependudukan lahan oleh investor asing ini tidak diragukan lagi berdampak signifikan pada

pertanian pribumi. Hal tersebut juga harus diingat bahwa kemungkinan lahan terbaik yang digunakan oleh produsen asing.

Pada bab 4 pengaruh keterkaitan ditelaah untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Hindia Belanda diuntungkan dengan adanya investasi asing. Keterkaitan ke belakang (ketika barang dan jasa digunakan untuk menjalankan proses produksi) adalah yang paling menonjol. Irigasi dan infrastruktur merupakan contoh yang baik. Meskipun perkebunan gula dan pertanian pribumi pada awalnya bersaing untuk mendapatkan lahan dan pasokan air yang sama, produsen pribumi mendapat manfaat dari pekerjaan irigasi begitu produsen gula pergi atau lahan tersedia kembali untuk mereka.

Banyak perusahaan asing membangun jalan. Jalur kereta api menghubungkan perkebunan, pelabuhan, desa, dan daerah yang sebelumnya benar-benar terisolasi. Jalan beraspal dan jembatan dibangun untuk memfasilitasi pengangkutan gula dan produk lainnya serta meningkatkan prospek pembangunan ekonomi lebih lanjut. Produksi skala besar oleh perusahaan asing memang memberi tekanan pada infrastruktur yang ada dan membutuhkan jalan baru. Dibandingkan dengan Jawa, infrastruktur fisik di luar Jawa kurang berkembang. Meskipun jalan dibangun terutama untuk kepentingan perusahaan, penduduk pribumi juga jelas mendapat manfaat dari perbaikan infrastruktur. Selama depresi ekonomi dan bahkan setelah kemerdekaan, dampak pembangunan infrastruktur tersebut masih terasa di Indonesia.

Output dari perusahaan asing ini terdiri dari komoditas ekspor primer, dan meskipun ada pengolahan lokal, keterkaitan ke depannya relatif jarang. Minyak disuling dan diproses di Hindia Belanda sebelum dikirim ke luar negeri dan pada akhir 1930-an, hampir semua pengolahan karet dilakukan di tanah jajahan Indonesia.

Perihal kompensasi dalam penggunaan lahan, upah dan hubungan permintaan akhir lainnya, masih dapat diperdebatkan apakah perusahaan telah memenuhi hak tersebut secara cukup untuk para pekerjanya. Meskipun kompensasi untuk penggunaan lahan akan dianggap memadai melalui perbandingan hasil dari sewa tanah dengan hasil dari penanaman oleh pemilik tanah itu sendiri, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa penduduk pribumi tidak dapat menggunakan tanah yang disita untuk waktu yang lama. Hal ini adalah biaya peluang yang diperburuk oleh pemindahan tanah. Kemungkinan telah terjadi semacam pemaksaan yang diterapkan kepada penduduk pribumi untuk menyewakan tanah.

Sebagian besar upah diperoleh dalam kegiatan ekonomi pribumi dan sulit untuk menyatakan bahwa penduduk pribumi Indonesia sangat bergantung pada pekerjaan di perusahaan asing. Perkiraan proporsi upah

yang dibayarkan oleh perusahaan asing kepada penduduk pribumi di Jawa bervariasi mulai dari 5,5% pada 1924 hingga 7,7% pada 1939 dari total pendapatan Indonesia. Di luar Jawa proporsinya berkisar antara 8–10%. Upah yang diperoleh penduduk Indonesia yang dipekerjakan oleh perusahaan asing tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh orang Indonesia dari usaha lain. Perusahaan asing juga menggunakan tenaga kerja imigran. Upah mereka seringkali lebih rendah daripada yang dibayarkan kepada buruh lokal dan perusahaan asing, yang mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk dapat melakukan kontrol terhadap tenaga kerja.

Makanan, perumahan, layanan kesehatan dan beberapa fasilitas pendidikan juga disediakan untuk buruh. Penyediaan layanan ini sangat penting untuk produktivitas perusahaan. Manfaat ini dapat semakin berkurang karena orang lain yang tinggal di dekat lokasi produksi dapat menggunakan rumah sakit dan fasilitas lain bahkan jika mereka tidak dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan juga memberikan kontribusi tidak langsung untuk irigasi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan melalui perpajakan. Operasional perusahaan swasta asing menyumbang sekitar 10% dari total pendapatan pajak, atau sekitar 5% dari total pendapatan pemerintah antara 1910 dan 1940. Namun, sekitar 10–20% dari PDB berasal dari kehadiran modal asing, sebagai perbandingan, perusahaan asing dapat dikatakan telah kurang pajak.

Pada bab 5 memaparkan tiga studi kasus, yaitu: Billiton, Deli Maatschappij dan HVA yang dibahas dalam rentang periode 1910–1942. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perintis yang menguntungkan. Usaha mereka bergerak di bidang industri kunci yang berbeda dan tidak sepenuhnya mewakili ekonomi kolonial. Ketiga perusahaan tersebut telah berkembang pesat sebelum 1910, puncak operasionalnya antara 1910 dan 1942 dan mereka tetap aktif bahkan setelah Indonesia merdeka. Ketiga perusahaan tersebut menghasilkan profit yang luar biasa selama 1910-an dan 1920-an. Pada 1930-an, mereka terdampak depresi ekonomi namun berhasil pulih setelahnya.

Mereka berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang paling terlihat. Jalur rel kereta api dan jalan dibangun oleh Deli Company, Billiton dan HVA. Tenaga kerja perusahaan didukung dengan perawatan kesehatan, perumahan dan sekolah. Hal ini membuat tenaga kerja lebih produktif dan penduduk sekitar juga dapat memperoleh manfaat dari layanan ini. Penyediaan sarana pendidikan, di sisi lain, kemungkinan besar hanya mempengaruhi sebagian kecil penduduk pribumi. Sekolah dibangun oleh perusahaan untuk anak-anak dari para buruh dan pelatihan juga diberikan, tetapi kemungkinan untuk dipromosikan sangat kecil.

Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) tidak hadir dalam skala yang substansial. Peleburan bijih timah tidak dilakukan di Belitung karena timah biasanya diolah di tempat lain. Deli Company tidak memproduksi cerutu dari daun tembakaunya dan selain mengolah tebu yang dipanen, tidak banyak hubungan ke depan yang terwujud di HVA. Meskipun perusahaan dan pimpinannya memiliki niat baik dalam merawat pekerjanya, namun hal ini semata-mata dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan.

Pada bab 6 perkembangan pascakemerdekaan dibahas. Berbagai tema dari bab-bab sebelumnya ditelaah kembali, khususnya dalam periode waktu 1942–1960. Pada masa awal pendudukan Jepang, perusahaan diambil alih oleh Jepang atau harus mulai memproduksi mesin perang Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin mengembalikan pemerintahan colonial dan melanjutkan bisnisnya seperti biasa. Belanda juga melakukan dua kali upaya untuk memperluas wilayah yang dikuasainya dengan kekuatan militer pada 1947 dan 1948–1949. Mereka berhasil melakukannya dan banyak pabrik dan perkebunan kembali berada di bawah kendali Belanda. Namun secara politis, agresi militer ini gagal. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Indonesia berjanji agar operasi perusahaan Belanda dapat dilanjutkan dan Indonesia setuju untuk membayar utang pemerintah colonial kepada Belanda.

Operasi bisnis swasta Belanda dilanjutkan hingga akhir 1950-an. Perusahaan pulih dan mendulang untung kembali. Pada pertengahan 1950-an, perusahaan asing masih memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besar investasi baru sekarang dilakukan oleh perusahaan minyak Amerika. Sekitar 10–20% dari PDB kemungkinan dihasilkan oleh perusahaan asing, mirip dengan situasi di akhir periode kolonial.

Signifikansi perusahaan swasta asing bagi pembangunan ekonomi Indonesia kini menjadi nyata khususnya melalui keterkaitan fiskal. Pajak perusahaan meningkat dan lebih banyak keuntungan tetap di Indonesia dibandingkan dengan periode sebelumnya. Keterkaitan lain menjadi kurang penting. Meski perusahaan mengeluhkan pajak yang tinggi, mereka tetap bersedia melanjutkan aktivitasnya walaupun prospeknya semakin suram seiring berjalannya waktu. Ini menunjukkan bahwa meskipun pajak lebih tinggi selama masa kolonial, perusahaan-perusahaan ini mungkin masih bersedia beroperasi di Indonesia. Jika demikian, maka ini adalah kesempatan yang terlewatkan bagi Indonesia yang seharusnya mampu mendapatkan keuntungan dari pajak yang lebih tinggi pada tahap awal.

Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia pada posisi menengah ke atas di perusahaan asing. Terutama dari pertengahan 1950-an, yang kemudian disebut Indonesianisasi menjadi lebih penting. Perlahan semakin sulit bagi perusahaan Belanda untuk membawa pengganti pekerja Belanda ke Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia dan serikat buruh kemajuannya terlalu lambat dan pada 3 Desember 1957 serikat buruh Indonesia menguasai banyak perusahaan Belanda. Hal ini didukung oleh pemerintah Indonesia yang menempatkan perusahaan yang disita di bawah pengawasan militer.

KPM adalah perusahaan pertamayang diambil alih dan hal ini segera diikuti oleh perusahaan lain. Pada 27 Desember 1958, undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan Belanda disahkan oleh parlemen Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut sekarang memiliki pemilik baru, tetapi perusahaan tetap menjadi aset produktif yang penting di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai warisan abadi.

Pada awalnya, nasionalisasi pada 1957–1959 berdampak besar pada perkembangan ekonomi Indonesia. Dekolonisasi ekonomi tampaknya hampir selesai pada 1959. Pada awal dan pertengahan 1960-an, perkembangan ekonomi hampir stagnan dengan tingkat PDB per kapita lebih rendah daripada 1941. Perdagangan dengan Belanda hampir tidak terjalin sama sekali tetapi perusahaan Amerika dan Inggris melanjutkan aktivitas mereka tanpa hambatan. Perusahaan minyak Amerika adalah investor baru yang paling penting.

Pada 1966 pemerintah Belanda dan Indonesia membuat perjanjian kompensasi atas nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Pembayaran ini diperkirakan sekitar 10-20% dari nilai perusahaan. Mempertimbangkan depresiasi dari waktu ke waktu, melebihi 10% per tahun, kompensasi dengan nilai hampir *f*700 juta, termasuk bunga, tampak lebih dari wajar. Untuk mendapatkan bantuan dan pendanaan internasional yang didukung oleh Belanda, Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut kepada Belanda. Setelah pergantian rezim pada 1966, investasi asing segera kembali ke Indonesia untuk membantu menyelamatkan ekonomi negara yang terkucilkan dari dunia luar.

Kesimpulannya, dalam tesis ini saya telah menganalisis perkembangan bisnis swasta Belanda di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia selama periode akhir kolonial dan awal kemerdekaan. Waktunya telah tiba untuk kembali ke pertanyaan penelitian utama saya: sejauh mana investasi swasta asing, terutama dari Belanda,

berkontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kolonial akhir? Tiga topik telah dibahas secara rinci: investasi, keuntungan dan keterkaitan. Antara 1910 dan 1940, sejumlah besar modal Belanda diinvestasikan di Indonesia. Sekitar seperempat dari semua investasi swasta Belanda dilakukan di Indonesia. Meskipun investasi ini dianggap lebih berisiko daripada investasi dalam negeri, dalam jangka panjang keuntungan yang jauh lebih besar dikantongi oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia daripada di Belanda. Pembayaran dividen yang besar kepada pemegang saham Belanda menghasilkan aliran modal yang cukup besar kembali ke negara asal. Menurut saya, hal ini dapat digambarkan secara wajar sebagai pengurusan kolonial. Di sisi lain, Sebagian besar keuntungan juga diinvestasikan kembali dalam perekonomian Indonesia.

Dalam hal output, laba, lapangan kerja, atau pendapatan pajak, perusahaan swasta asing merupakan bagian yang relatif kecil dari perekonomian Indonesia. Baik pada periode akhir kolonial maupun awal kemerdekaan, aktivitas modal asing menyumbang tidak lebih dari 10–20% PDB. Selama tahun-tahun puncak, hingga 10% pekerjaan dan pendapatan penduduk pribumi berasal dari sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, pada tingkat ekonomi makro, penduduk pribumi Indonesia tidak terlalu bergantung pada investasi asing.

Namun demikian, angka perkiraan ini tidak memperhitungkan dampak ekonomi tidak langsung dari perusahaan asing atau efek yang lebih luas dari reinvestasi keuntungan di Indonesia. Efek positif tidak langsung tersebut sulit dihitung dan perlu diimbangi dengan pengurusan kolonial.

Pertanyaan lain yang juga perlu dijawab adalah apakah orang Indonesia akan lebih baik, secara ekonomi, dalam situasi non-kolonial. Tidak dapat disangkal, perusahaan asing dan pemilik serta pekerja Eropa mereka memang berkontribusi pada pendapatan publik, tetapi mereka hanya dibebani pajak yang rendah. Dalam konteks ini, rendahnya pajak perusahaan asing merupakan peluang yang terlewatkan bagi perekonomian Indonesia selama masa kolonial.

Kompensasi yang diberikan oleh aktivitas bisnis asing bagi tenaga kerja, lahan, dan sumber daya alam Indonesia, paling baik digambarkan sebagai sedang (menengah/rata-rata). Pada beberapa kasus, pemaksaan dilibatkan dalam mendapatkan akses ke lahan dan tenaga kerja serta memungkinkan produksi bagi perusahaan asing pada awalnya.

Berbeda dengan citra negatif tersebut, tidak dapat disangkal bahwa aktivitas bisnis tertentu di beberapa wilayah Indonesia memang memberikan manfaat tidak langsung kepada penduduk lokal dalam bentuk infrastruktur dan sistem irigasi, di samping dampak keterkaitan lainnya seperti

perumahan, rumah sakit dan sekolah. Dalam jangka panjang, Indonesia memang diuntungkan dari hal ini. Hingga saat ini, infrastruktur tetap menjadi warisan nyata dari investasi swasta Belanda di Indonesia. Gambaran keseluruhan mengenai masa lalu kolonial tetap merupakan pesan yang bercampur (beragam). Terdapat beberapa daerah di mana investasi asing sangat minim, akan tetapi ada juga daerah-daerah tertentu di mana modal asing Eropa dan kepentingan lokal terakomodasi dengan baik.